

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, PENGENDALIAN
INTERNAL DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP
EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KECURANGAN
(Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten
Temanggung)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:
Rizky Eka Wijaya
NIM. 16.0102.0048

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2020**

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, PENGENDALIAN
INTERNAL DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP
EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KECURANGAN
(Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten
Temanggung)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun Oleh:
Rizky Eka Wijaya
NIM : 16.0102.0048

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2020**

SKRIPSI

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, PENGENDALIAN INTERNAL, *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KECURANGAN

(Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Rizky Eka Wijaya

NPM 16.0102.0048

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 14 Agustus 2020.....

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Siti Noor Khikmah, S.E., M.Si., Ak.

Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji

Siti Noor Khikmah, S.E., M.Si., Ak.

Ketua

Yulinda Devi Pramita, S.E., M.Sc., Ak.

Sekretaris

Faqiatul Mariya Waharini, S.E., M.Si

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal

10 4 SEP 2020

Dra. Marlina Kurnia, MM

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Eka Wijaya
NIM : 16.0102.0048
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Progam Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, PENGENDALIAN
INTERNAL DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP
EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KECURANGAN
(Studi empiris pada Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 04 Agustus 2020
Pembuat Pernyataan,



Rizky Eka Wijaya
NIM. 16.0102.0048

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizky Eka Wijaya
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat,Tanggal Lahir : Magelang, 04 Oktober 1995
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jln. Serayu IV Kampung Menowo No. 347 RT 01 /
RW 09 Kedungsari Magelang Utara
Alamat Email : rizjayaer@gmail.com

Pendidikan Formal

SD (2002-2008) : SD Muhammadiyah 1 Alternatif
SMP (2008-2011) : SMP N 3 Magelang
SMA (2011-2014) : SMK WIYASA Magelang
PT (2016-2020) : S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

Pengalaman Organisasi :

- Himpunan Mahasiswa akuntansi (HMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai anggota (2016-2017).
- Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai pengurus divisi penelitian dan pengembangan (2017-2018).
- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai kepala departemen sumber daya manusia (2018-2019).

Magelang, 04 Agustus 2020
Pembuat Pernyataan,



Rizky Eka Wijaya
NIM. 16.0102.0048

MOTTO

“Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan : sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepadaNya lah kita kembali”

(Qs Al-Baqarah : 155-156)

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”

(Qs Ali Imran : 139)

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya”

(Qs Ath-Thalaq : 2-3)

“There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of failure”

(Paulo Coelho, The Alchemist)

“Bila kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Jika kamu tidak pernah bertanya, maka kamu tidak akan pernah mendapat jawaban. Dan bila kamu tidak melangkah maju, maka kamu akan tetap berada di tempat yang sama”

(Nora Roberts)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Atas karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Good Corporate Governance*, Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* Terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan Studi Empiris pada Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung).**

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Akuntansi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar besarnya kepada:

1. Bapak, Ibu, dan Adik terimakasih atas do'a dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
2. Dr. Wawan Sadtyo Nugroho, S.E., M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
3. Ibu Siti Noor Khikmah, S.E., M.Si, Ak., selaku Dosen Pembimbing satu yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Yulinda Devi Pramita, S.E., M.Sc., Ak selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah membantu memberikan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
5. Ibu Faqiatul Mariya Waharini, S.E., M.Si selaku dosen penguji 2 (dua) yang sudah membantu memberikan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Teman-teman akuntansi angkatan 2016, sahabat terbaik dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis hanya dapat mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Magelang, 04 Agustus 2020
Pembuat Pernyataan,



Rizky Eka Wijaya
NIM. 16.0102.0048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	11
A. Telaah Teori	11
B. Telaah Penelitian Sebelumnya	20
C. Perumusan Hipotesis.....	22
D. Model Penelitian	28
BAB III.....	29
METODA PENELITIAN	29
A. Metode Penelitian.....	29
C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	31
D. Alat Analisis Data	32
1. Statistik Deskriptif.....	32
2. Uji Kualitas Data	33

E. Pengujian Hipotesis.....	34
1. Uji Regresi Linear Berganda	34
2. Uji Hipotesis.....	35
BAB IV	38
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Statistik Deskriptif Data.....	38
B. Statistik Deskriptif Responden.....	39
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	41
D. Uji Kualitas Data.....	43
E. Analisis Regresi Linier Berganda	46
F. Uji Hipotesis.....	46
1. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)	46
2. Uji F (<i>Goodness of Fit</i>).....	47
3. Uji T.....	48
G. Pembahasan.....	50
BAB V.....	58
KESIMPULAN	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	28
Gambar 3.1 Penerimaan Uji F.....	36
Gambar 3.2 Penerimaan Uji T Positif	37
Gambar 3.3 Penerimaan Uji T Negatif	37
Gambar 4.1 Penerimaan Hipotesis Uji F	48
Gambar 4.2 Penerimaan Hipotesis <i>Good Corporate Governance</i>	49
Gambar 4.3 Penerimaan Hipotesis Pengendalian Internal	49
Gambar 4.4 Penerimaan Hipotesis <i>Whistleblowing System</i>	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Jumlah Dana Korupsi BPR Se-Karesidenan Kedu.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	20
Tabel 3.1 Definisi dan Pengukuran Variabel	31
Tabel 4.1 Tabel Statistik Penyebaran Sampel.....	39
Tabel 4.2 Profil Responden.....	39
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	41
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas.....	43
Tabel 4.5 Cross Loading	44
Tabel 4.6 Pengujian Reabilitas.....	45
Tabel 4.7 Koefisien Regresi	46
Tabel 4.8 Uji R ²	47
Tabel 4.9 Uji F	47
Tabel 4.10 Uji T	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	67
Lampiran 2. Surat Perizinan dan Daftar Kunjungan.....	77
Lampiran 3. Daftar BPR Se-Kabupaten Temanggung.....	81
Lampiran 4. Daftar Sampel.....	82
Lampiran 5. Tabulasi Hasil Kuesioner.....	83
Lampiran 6. Tabulasi Hasil Kuesioner Yang Diolah.....	91
Lampiran 7. Tabel <i>Cross Loading</i>	95
Lampiran 8. Statistik Deskriptif.....	97
Lampiran 9. Uji Validitas.....	98
Lampiran 10. Uji Reliabilitas.....	105
Lampiran 11. Uji Regresi.....	106

ABSTRAK

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, PENGENDALIAN INTERNAL, *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TERHADAP EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KECURANGAN

(Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung)

Oleh:
Rizky Eka Wijaya

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance*, Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan. Penelitian ini menggunakan sampel kepala yang bekerja pada Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berdasarkan kuisisioner yang dibagikan kepada kepala Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung sebanyak 82 eksemplar, dan kuisisioner yang dapat diolah sebanyak 44 eksemplar. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 44, yaitu kepala di Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung yang memiliki gelar minimal S1 dan memiliki masa kerja lebih dari satu tahun. Pemilihan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good corporate governance*, pengendalian internal dan *whistleblowing system* berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pencegahan kecurangan.

Kata kunci: *good corporate governance, pengendalian internal, whistleblowing system, efektivitas pencegahan kecurangan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecurangan sering ditemukan dalam lingkup perusahaan barang, jasa, manufaktur dan perbankan. Tindakan kecurangan merupakan tindakan yang tidak etis sehingga memberikan dampak negatif tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi organisasi atau lingkungan. Kecurangan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang terjadi karena ada faktor tekanan, kesempatan (peluang), dan rasionalisasi yang dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi serta dapat merugikan orang lain (Tuanakotta, 2012:207). Kecurangan dapat diberantas dengan melakukan pencegahan kecurangan. BPKP (2015:37) Pencegahan kecurangan merupakan tindakan aktivitas memerangi kecurangan dengan biaya yang murah. Pencegahan kecurangan bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati. Jika menunggu terjadinya kecurangan baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu, bandingkan bila kita berhasil mencegahnya tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku kecurangan. Pencegahan dilakukan agar kecurangan dalam perusahaan tidak terjadi, sehingga tujuan dan sasaran organisasi akan tercapai dan membuat reputasi organisasi menjadi lebih baik.

Purba (2015), menyatakan bahwa pencegahan kecurangan berfungsi sebagai penghambat yang kuat terhadap orang-orang yang berupaya untuk

melaksanakan kecurangan. Oleh karena itu dengan melaksanakan pencegahan kecurangan secara efektif akan menjadi penghalang yang kuat bagi pelaku kecurangan potensial. Pencegahan dini terhadap kecurangan dianggap sebagai sebuah solusi guna untuk menangkai pelaku potensial, mempersempit ruang gerak dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi terjadinya kecurangan (Karyono, 2017).

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan bahwa kasus kecurangan atau tindak pidana perbankan di Indonesia masih cukup tinggi. Sejak periode 2005 hingga Juli 2019, LPS menangani 98 bank gagal dengan jumlah klaim mencapai Rp1,4 triliun, 96 BPR ditutup, satu bank umum ditutup dan satu bank umum yang diselamatkan (www.bisnis.com). Tindakan kecurangan dalam sektor perbankan, dapat diartikan sebagai pelanggaran atas aturan-aturan, sistem, dan prosedur internal. Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, salah satu perbankan yang ada di Indonesia yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas lembaga keuangan di Indonesia menyebutkan bahwa tindak pidana perbankan paling rentan terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat dibandingkan dengan Bank Umum. Banyaknya jumlah Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi menyebabkan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat lebih sulit sebagaimana diterapkan pada bank-bank umum. Mengakibatkan potensi kecurangan pada Bank Perkreditan Rakyat lebih tinggi dibandingkan bank umum. Sistem

pengawasan yang lebih ketat pada bank umum menyebabkan kecurangan lebih mudah terdeteksi sehingga dapat diselesaikan secara internal dan tidak merugikan nasabah. Bercermin pada fenomena tersebut, Bank Perkreditan Rakyat perlu memiliki Pengendalian Internal Bank Perkreditan Rakyat yang andal.

Fenomena yang berkaitan dengan efektivitas pencegahan kecurangan pada dunia perbankan adalah dengan adanya kasus kecurangan yang terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat, kecurangan erat kaitannya dengan peran pengendalian internal Bank Perkreditan Rakyat yang kurang efektif dalam melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap seluruh proses dan tahapan kegiatan. Kasus kerugian yang ditanggung BPR BKK Pringsurat Temanggung tentang penempatan dana ke Koperasi Intidana, adanya kredit macet, adanya kredit fiktif, pembuatan rekening pribadi untuk menampung dana, bunga tidak sesuai ketentuan OJK (www.semarang.bpk.go.id).

Kantor Regional III Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kecurangan di BPR yang sedang diawasi tersebut menyebabkan rasio kecukupan modalnya menjadi terganggu. Jawa Tengah ada 345 BPR, jika ada 1-2 BPR bermasalah itu tidak signifikan maka akan mengganggu perbankan secara keseluruhan di Jawa Tengah. Salah satu wilayah Jawa Tengah yaitu Karesidenan Kedu ada 3 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang terjadi kasus korupsi yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kebumen. Alasannya, karena kondisi keuangannya buruk

akibat tindakan kecurangan. Dibawah ini terdapat rincian kecurangan selama tahun 2013 – 2018 :

Tabel 1.1
Rincian jumlah dana korupsi
BPR Se-Karesidenan Kedu

NO	KAB / KOTA	TAHUN TERJADINYA	JUMLAH
1	KAB. PURWOREJO	2013	Rp 18.958.005.614
2	KAB. TEMANGGUNG	2018	Rp 103.000.000.000
3	KAB. KEBUMEN	2018	Rp 373.000.000
4	KOTA MAGELANG	TIDAK ADA	TIDAK ADA
5	KAB. MAGELANG	TIDAK ADA	TIDAK ADA
6	KAB. WONOSOBO	TIDAK ADA	TIDAK ADA

Sumber (www.semarang.bpk.go.id, 2018)

Berdasarkan fenomena diatas ditemukan kasus dana korupsi terbanyak di BPR Se-Karesidenan Kedu adalah Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung termasuk masuk dalam wilayah Se-Karisidenan Kedu yang tingkat kecurangan BPR sangat tinggi. Kabupaten Temanggung terdapat satu BPR yang dilikuidasi karena kasus korupsi yaitu PD BPR BKK Pringsurat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng sudah memeriksa BPR BKK Pringsurat Temanggung awal 2009-2018. Hal itu berkaitan dengan tindakan kecurangan tentang aliran dana Rp103 miliar (www.semarang.bpk.go.id). PD BPR BKK Se- Kabupaten Temanggung merupakan salah satu lembaga perbankan yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung, sebagai lembaga intermediasi antara bank dan kelompok usaha mikro melakukan terobosan yang dapat menunjang peningkatan perekonomian rakyat di wilayah Kabupaten Temanggung. (www.pd-bprbkktemanggung.com).

Efektivitas pencegahan kecurangan tidak terlepas dengan penerapan *good corporate governance*. Sari *et al.*, (2015) *Good Corporate Governance* merupakan seperangkat aturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, kreditur, pengurus, karyawan, pemerintah serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban, serta dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Dinata *et al.*, (2018) mengemukakan suatu perusahaan dengan *good corporate governance* yang baik tidak seharusnya terjadi kecurangan di dalamnya. Jika dalam perusahaan tersebut masih ada kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang yang secara langsung ataupun tidak langsung terlibat didalamnya, maka dapat dipastikan bahwa *good corporate governance* tersebut kurang baik. Soleman, (2013) mengemukakan bahwa *good corporate governance* dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan. Penelitian Kurniawan & Izzaty, (2019) mengemukakan bahwa *good corporate governance* dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Berbeda dengan penelitian Setiawan, (2016) mengemukakan bahwa implementasi *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan.

Efektivitas pencegahan kecurangan dapat dilakukan apabila pengendalian internal semakin efektif diterapkan oleh organisasi. Pengendalian internal yang efektif membantu melindungi aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya,

meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran (Susanto, 2017). Anna, (2019) menjelaskan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Sumendap *et al.*, (2019) mengemukakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Megawati, (2018) mengemukakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan.

Purba, (2015) mengemukakan prinsip pencegahan kecurangan memiliki mekanisme yang membuat kecurangan dapat dilaporkan, pelaporan kecurangan sangat dibutuhkan di suatu organisasi ataupun perusahaan dengan adanya sistem pelaporan pengaduan berupa *whistleblowing system* karyawan dapat menjaga identitas diri ketika melaporkan tindakan kecurangan. Libramawan, (2014) mengemukakan bahwa penerapan *whistleblowing system* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan *whistleblowing system* semakin tinggi, maka pencegahan kecurangan juga semakin tinggi. Sudarma *et al.*, (2019) mengemukakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan.

Penelitian ini mengembangkan dari penelitian Kurniawan & Izzaty, (2019). Penelitian Kurniawan & Izzaty, (2019) menunjukkan bahwa *good corporate governance* dan pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Kurniawan & Izzaty, (2019) yaitu menggunakan variabel *good corporate governance* dan pengendalian internal. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian Kurniawan & Izzaty, (2019) yaitu, pertama menambahkan variabel *whistleblowing system* yang berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan kecurangan. Adanya penyelenggaraan *whistleblowing system*, maka akan timbul keengganan untuk melakukan pelanggaran dan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena semakin meningkatnya kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif untuk mencegah kecurangan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008:2). Penerapan *whistleblowing system* ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang diderita perusahaan, serta untuk menyelamatkan usaha mereka. Sistem yang dibangun ini kemudian disesuaikan ke dalam aturan, sehingga diharapkan sistem ini akan memberikan manfaat bagi peningkatan pelaksanaan tatakelola (Semendawai *et al.*, 2011). *Whistleblowing System* seharusnya sudah diterapkan oleh semua Bank Perkreditan Rakyat namun masih ada yang belum menerapkan.

Utami *et al.*, (2019) menyatakan *whistleblowing system* terbukti memiliki efek terhadap pengungkapan kasus kecurangan, penting bagi perusahaan untuk meningkatkan pelaksanaan *whistleblowing system* karena selain mampu menurunkan kasus kecurangan secara langsung juga dapat membantu sehingga jumlah kasus kecurangan yang terjadi pada perusahaan dapat diminimalisir. Penerapan *whistleblowing system* yang efektif, transparan dan bertanggung jawab akan mendorong partisipasi karyawan untuk lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya kecurangan (Lestari, 2019). Alasan penambahan variabel juga terkait penelitian-penelitian

sebelumnya mengenai *whistleblowing system* memberikan hasil yang belum konsisten, maka perlu adanya penelitian kembali mengenai *whistleblowing system*. Nugroho, (2015), Nurcahyo & Sulhani, (2017) menyatakan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Kedua adanya perbedaan Studi Empiris, yaitu penelitian sebelumnya pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunung Rizki Semarang, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Se-Kabupaten Temanggung, dengan alasan di Kabupaten Temanggung ditemukan kasus dana korupsi terbanyak di BPR Se-Karesidenan Kedu.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan kecurangan.
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan kecurangan.
3. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan kecurangan.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap efektivitas pencegahan kecurangan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan kecurangan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *whistleblowing system* terhadap efektivitas pencegahan kecurangan.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan dan memberikan pemahaman serta meningkatkan wawasan dalam bidang perbankan mengenai masalah efektivitas pencegahan kecurangan dan menambah keilmuan akuntansi yaitu *auditing*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi pengetahuan tentang pengaruh *good corporate governance*, pengendalian internal, *whistleblowing system* terhadap efektivitas pencegahan kecurangan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan perbankan dalam efektivitas pencegahan kecurangan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok-pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, hasil penelitian terdahulu, hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program SPSS berupa analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan suatu hubungan kerja sama didalam organisasi atau perusahaan antara pemegang saham (*principle*) dengan agen perusahaan untuk memenuhi kontrak yang telah disepakati oleh keduanya (Jensen & Mecking, 1976). Perkembangan perusahaan saat ini perlu adanya pemisahan antara pemegang saham dengan pengelola perusahaan, diharapkan dengan adanya kerja sama tersebut para pengelola perusahaan harus berusaha mencapai tujuan perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk meningkatkan kekayaan pemilik. *Principle* memberikan wewenang kepada manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham dalam pengambilan keputusan, namun ketika adanya kepentingan yang berbeda antara manajer dengan pemilik, maka keputusan yang diambil lebih diprioritaskan oleh manajer dibandingkan dengan pemilik (Tulus, 2014).

Jensen & Mecking, (1976) menjelaskan prinsipal dapat membatasi perbedaan dari ketertarikannya dengan menetapkan insentif yang sesuai untuk agen dan dengan menimbulkan biaya pemantauan (*monitoring cost*) yang dirancang untuk membatasi aktivitas agen yang menyimpang. Lebih lanjut, dalam beberapa situasi, prinsipal tersebut akan membayar agen

untuk mengeluarkan sumber daya (biaya ikatan/*bonding cost*) untuk menjamin bahwa agen tidak akan mengambil tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau untuk memastikan bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika melakukan tindakan tersebut.

Eisenhardt, (1989) mengemukakan bahwa unit analisis dari teori agensi adalah kontrak yang mengatur hubungan antara prinsipal dan agen, sehingga fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mengatur hubungan prinsipal dan agen, di mana dilandasi oleh 3 asumsi, yaitu:

1) Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki kecenderungan sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan menghindari risiko (*risk aversion*).

2) Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi keorganisasian mengemukakan adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen.

3) Asumsi tentang informasi

Asumsi tentang informasi mengemukakan bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Sebagai akibat adanya hubungan antara prinsipal dan agen ini, pihak prinsipal harus mengeluarkan biaya yang disebut dengan *agency*

cost. *Agency cost* akan muncul sebagai akibat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan *agency cost* sebagai jumlah dari :

1) *The monitoring expenditures by the principal*

Biaya ini merupakan biaya pengawasan yang harus dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku dan tindakan agen.

2) *The bonding expenditures by the agent*

Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk menjamin bahwa agen tidak akan melakukan tindakan yang merugikan principal.

3) *The residual loss*

Biaya penurunan kemakmuran setara nilai mata uang yang dialami oleh principal akibat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki *zero agency cost* dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan pemegang saham karena adanya perbedaan kepentingan yang besar diantara Prinsipal dan agen. Prinsipal selaku pemberi mandat kepada agen harus mengeluarkan biaya yang disebut *agency cost* sebagai sebuah upaya pengendalian terhadap perilaku dan tindakan agen meskipun pada dasarnya, *agency cost* ini tidak dapat mengurangi keseluruhan tindakan penyelewangan dari agen.

Konsep dari teori agensi adalah adanya pemisahan peran antara pemegang saham sebagai principal dan manajer sebagai agen. Karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen, muncul masalah agensi (*agency problem*) yang mencakup masalah *agency cost* dan pemantauan oleh prinsipal. Eisenhardt, (1989) menjelaskan bahwa adanya kontrak antara prinsipal dan agen menimbulkan 2 (dua) masalah utama yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*.

- 1) *Adverse selection* merupakan kondisi dimana satu pihak atau lebih yang melakukan suatu transaksi usaha memiliki informasi lebih daripada pihak-pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan lebih mengetahui kondisi kini dan prospek ke depan suatu perusahaan dari pada para investor.
 - 2) *Moral hazard* merupakan kondisi dimana satu pihak atau lebih yang melakukan transaksi usaha dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. *Moral hazard* dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar.
2. Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan merupakan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan

keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (Umar, 2017).

The Association of Certified Fraud Examiners, (2016) menggambarkan bagan skema kecurangan dalam dunia kerja yang disebut dengan *fraud tree* atau pohon kecurangan. Dalam bagan tersebut ACFE membagi kecurangan menjadi tiga cabang, yaitu:

1) Korupsi (*Corruption*)

Korupsi yaitu kecurangan yang dilakukan seorang individu dengan cara menyalahgunakan kepercayaan yang dikuasakan kepada mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi. Skema ini merupakan kecurangan yang paling sulit dideteksi karena adanya kerjasama pihak yang terkait untuk menutupi kecurangan tersebut.

2) Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Tindak kecurangan yang paling mudah untuk dideteksi adalah penyalahgunaan aset. Hal tersebut dikarenakan sifat aset yang *tangible* dan *countable*. Skema ini terjadi ketika seorang karyawan menyalahgunakan atau mencuri aset perusahaan untuk kepentingan pribadi.

3) Kecurangan laporan keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan laporan keuangan yaitu tindakan yang disengaja, baik karena tindakan atau kelalaian yang pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan. Rekayasa informasi keuangan ini

dilakukan supaya kinerja keuangan perusahaan terlihat baik di mata stakeholder, tindakan ini biasa dikenal dengan istilah window dressing.

3. Efektivitas Pencegahan Kecurangan

Sudarmo *et al.*, (2008), pencegahan kecurangan adalah upaya yang terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab kecurangan yaitu memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan, menurunkan tekanan kepada pegawai agar mampu memenuhi kebutuhannya dan mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindak kecurangan yang dilakukan.

Committee of Sponsoring Organizations (2013), pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Nadia *et al.*, (2018), pencegahan kecurangan dengan menjabarkan berbagai sarana kendali. Sarana kendali dimaksud adalah dengan menciptakan kebijakan, prosedur, organisasi, teknik pengendalian, dan peran serta pegawai. Suatu unit organisasi atau perusahaan harus membuat kebijakan yang dapat menciptakan lingkungan atau suasana kerja yang kondusif untuk menghadapi dan menangkal tindakan kecurangan.

Manajemen dan seluruh karyawan harus mempunyai komitmen yang sama untuk mencegah kecurangan dan penyimpangan lain.

4. *Good Corporate Governance*

Sutedi, (2011) mendefisikan *good corporate governance* adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Nilai tambah yang dimaksud adalah *corporate governance* memberikan perlindungan efektif terhadap investor dalam memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Bank Indonesia (BI) menjelaskan bahwa *good corporate governance* merupakan tata kelola bank melalui penerapan beberapa prinsip, yaitu:

- 1) *Transparency* (Keterbukaan), yaitu prinsip yang menjunjung keterbukaan dalam mengungkapkan segala informasi yang material secara memadai, tepat waktu dan akurat serta keterbukaan perusahaan dalam pengambilan keputusan.
- 2) *Accountability* (Akuntabilitas), yaitu prinsip yang menuntut adanya kejelasan fungsi atau pemisahan tugas dan pelaksanaan tanggung jawab setiap bagian dalam perusahaan sehingga perusahaan dapat dikelola dengan baik.
- 3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban), yaitu prinsip yang mengharuskan agar pengelolaan perusahaan sesuai dan patuh terhadap prinsip korporasi yang sehat dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) *Independency* (Kemandirian), yaitu prinsip yang mengharuskan pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan atau tekanan dari pihak manapun.

- 5) *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran), yaitu prinsip yang menuntut pemenuhan hak-hak pemegang saham secara adil dan setara sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pengendalian Internal

SAS No.78 (AU 319), (1995) menyebutkan bahwa suatu susunan pengendalian internal terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dibuat untuk memberikan kepastian secara wajar bahwa tujuan perusahaan secara khusus akan dicapai. Herbert, (1979:121-122) mengatakan bahwa pengendalian internal terdiri dari pengendalian administratif dan pengendalian akuntansi.

- 1) Pengendalian administratif meliputi perencanaan organisasi, prosedur dan pencatatan yang berkaitan dengan proses keputusan berdasarkan otorisasi manajemen atas transaksi. Otorisasi merupakan fungsi manajemen yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab pencapaian tujuan organisasi dan merupakan langkah awal untuk menetapkan pengendalian transaksi akuntansi.
- 2) Pengendalian akuntansi terdiri dari perencanaan organisasi, prosedur dan catatan yang berkaitan dengan perlindungan aktiva (*asset*) dan kendala pencatatan akuntansi yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar.

Sawyer *et al.*, (2003:66) mengatakan bahwa terdapat lima komponen pengendalian internal yang saling berkaitan pada pernyataan

(*Committee of Sponsoring Organization*, 2013) atau disebut dengan model pengendalian COSO. kelima komponen tersebut adalah

- 1) Lingkungan pengendalian
- 2) Penentuan risiko
- 3) Aktivitas pengendalian
- 4) Informasi dan Komunikasi
- 5) Pengawasan

6. *Whistleblowing System*

Whistleblowing merupakan pengungkapan praktik ilegal, tidak bermoral atau melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota organisasi baik mantan pegawai atau yang masih bekerja yang terjadi di dalam organisasi tempat mereka bekerja. Pengungkapan dilakukan kepada seseorang atau organisasi lain sehingga memungkinkan dilakukan suatu tindakan (Miceli & Near, 1985). Susmanschi, (2012) mendefinisikan *whistleblower* sebagai seseorang (pegawai dalam organisasi) yang memberitahukan kepada publik atau kepada pejabat yang berkuasa tentang dugaan ketidak jujur, kegiatan ilegal atau kesalahan yang terjadi di departemen pemerintahan, organisasi publik, organisasi swasta atau pada suatu perusahaan.

Nugroho, (2015) menjelaskan sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* adalah wadah bagi seorang *whistleblower* untuk mengadukan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal organisasi. Penanganan *whistleblowing system* yang baik

diharapkan akan menambah kesadaran bahwa pegawai pemerintah harus terus menjaga integritasnya. *Whistleblower* yang akan mengungkapkan penyimpangan integritas dalam menjalankan tugas dan berakibat pada penjatuhan sanksi hukuman tanpa memandang bulu. *Whistleblowing System* diharapkan dapat menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional dan bertanggung jawab (www.kemenkeu.go.id).

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti & Tahun	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1	(Kurniawan & Izzaty, 2019)	Independen: <i>Good Corporate Governance, Pengendalian Internal</i> Dependen: <i>Pencegahan Fraud</i>	Metode <i>total sampling</i> dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel.	<i>Good Corporate Governance</i> dan Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>
2	(Clinton & Lay, 2019)	Independen: Efektivitas <i>Whistleblowing System</i> Dependen: <i>Pencegahan Fraud</i>	Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi.	<i>Whistleblowing System</i> sudah berjalan dengan baik dan efektif dalam mencegah <i>fraud</i> .
3	(Utami et al., 2019)	Independen: Efektivitas Komite Audit, Audit Internal Moderasi: <i>Whistleblowing System</i> Dependen: Kecurangan	Teknik pengambilan sampel penelitian ini dengan pendekatan <i>purposive sampling</i>	<i>Whistleblowing System</i> memperkuat pengaruh komite audit dan audit internal untuk mengungkap kasus kecurangan.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya (Lanjutan)

No	Peneliti & Tahun	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
4	(Lestari <i>et al.</i> , 2019)	Independen: Penerapan Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Efektivitas <i>Whistleblowing System</i> Dependen: Pencegahan <i>Fraud</i>	Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode <i>sampling</i> jenuh	Akuntansi Forensik berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Audit Investigatif tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> . efektivitas <i>Whistleblowing System</i> berpengaruh terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>
5	(Rohimah & Anna, 2019)	Independen: Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Dependen: Pencegahan Kecurangan	Penelitian ini menggunakan metode <i>non probability sampling</i> dengan teknik <i>purposive sampling</i>	Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan
6	(Rowa & Arthana, 2019)	Independen: <i>Good Corporate Governance</i> Dependen: Pencegahan <i>Fraud</i>	Metode pengujian yang digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial	<i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan
7	(Nadia <i>et al.</i> , 2018)	Independen: <i>Good Corporate Governance</i> , Pengendalian Internal Dependen: Pencegahan <i>Fraud</i>	Penelitian ini menggunakan metode <i>purposive non random sampling</i>	<i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan untuk mengungkap kasus kecurangan.
8	(Megawati, 2018)	Independen: Pengendalian Internal, Budaya Etis Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Dependen: <i>Fraud</i>	Penelitian ini menggunakan teknik <i>random sampling</i>	Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> . Budaya Etis Organisasi dan Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2020.

C. Perumusan Hipotesis

1. *Good Corporate Governance* terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan

Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001) mendefinisikan *good corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dan disebut sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Teori agensi menjelaskan bahwa setiap perusahaan harus memiliki *good corporate governace*, tujuannya untuk melindungi kepentingan pihak prinsipal yang sering dirugikan akibat tindakan menyimpang agen. Terutama tindakan pada ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen. Teori agensi menjelaskan perbedaan informasi yang dimiliki antara prinsipal dan agen menciptakan kondisi yang tidak seimbang yang dinamakan asimetri informasi. *Good Corporate Governance* dapat menjadi salah satu mekanisme yang mengurangi

masalah agensi. *Good Corporate governance* dapat memonitor kontrak yang telah ada antara prinsipal dan agen. Ketika ditemukan pelanggaran, maka akan ada sanksi yang diberikan oleh *principal* sebagai pihak yang mendelegasikan wewenang kepada agen (La Porta *et al.*, 2000).

Husna (2013) menyatakan bahwa penerapan *good corporate governance* berdampak pada fokusnya pengelolaan perusahaan meliputi pembagian tugas, tanggung jawab setiap karyawan, dan pengawasan yang lebih jelas. Tata kelola perusahaan yang semakin tinggi membuat kecurangan dalam perusahaan dapat dicegah lebih dini. Kurniawan & Izzaty, (2019) menyatakan bahwa penerapan *good corporate governance* dapat mencegah terjadinya kecurangan, begitupun sebaliknya jika perusahaan tidak menerapkan *good corporate governance*, kemungkinan terjadinya kecurangan akan lebih besar karena manajemen perusahaan tidak berjalan secara profesional. Nadia *at el.*, (2018) menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

H1. *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan.

2. Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan.

Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas-entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yakni: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang

berlaku (Agoes, 2017). Wulandari & Nuryanto (2018) menyatakan bahwa strategi pencegahan kecurangan dengan cara menciptakan kondisi yang mampu mendorong pencegahan kecurangan, untuk melaksanakan strategi ini, pengendalian internal harus dilaksanakan secara efektif. Terjadinya kecurangan dapat dideteksi dan dicegah secara dini dengan pengendalian internal yang baik.

Teori agensi menjelaskan bahwa pengendalian internal sangat penting untuk meminimalisir potensi kecurangan dalam perusahaan baik yang dilakukan oleh manajemen maupun karyawan. Berdasarkan teori agensi pemisahan pengendalian dalam perusahaan berdampak pada timbulnya hubungan agen dengan prinsipal. Prinsipal adalah pihak yang memberikan wewenang kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen adalah pihak yang diberi oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen diharuskan untuk berbuat sesuai dengan yang diinginkan oleh prinsipal. Agen tidak selalu bertindak sesuai dengan harapan principal, untuk itu prinsipal perlu membatasi perilaku agen dengan memberikam insentif sesuai kinerja agen dan melakukan *monitoring* terhadap tindakan agen agar tidak terjadi penyimpangan (Jensen & Mecking, 1976). Dewi (2017) menyatakan sistem pengendalian internal diharapkan akan mengurangi adanya penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh manajemen. Jika pengendalian tidak berjalan dengan baik dan prosedur tidak dilakukan sebagaimana mestinya akan membuka

peluang bagi para karyawan yang terlibat dalam kegiatan operasional organisasi akan melakukan kecurangan.

Wulandari & Nuryanto (2018) menyatakan bahwa pengendalian internal mempunyai pengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Kurniawan & Izzaty, (2019) menyatakan bahwa penerapan pengendalian internal dapat mencegah terjadinya kecurangan. Larasati & Surtikanti (2019) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Adiko *et al.*, (2019) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Salim *et al.*, (2019) menyatakan bahwa pengendalian internal juga memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Pengendalian Internal merupakan cara yang paling efektif dalam perusahaan untuk meminimalisir bahkan mengeliminasi kesempatan para anggota perusahaan untuk melakukan kecurangan.

H2. Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan.

3. Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Efektivitas Pencegahan kecurangan.

Whistleblowing System adalah suatu sistem yang dirancang sedemikian rupa mengenai kriteria kecurangan yang dilaporkan yang meliputi pelapor sekurangnya harus dapat menjelaskan apa yang terjadi (*what*), pihak yang terlibat (*who*), waktu kejadian (*when*), lokasi kejadian (*where*), dan bagaimana terjadinya (*how*), tindak lanjut dari laporan tersebut, *reward* dan perlindungan bagi sang pelapor atau

whistleblower, dan hukuman atau sanksi untuk terlapor. Sistem ini merupakan wadah atau saluran bagi *whistleblower* untuk mengungkap dan melaporkan tindak kecurangan (www.bi.go.id) .

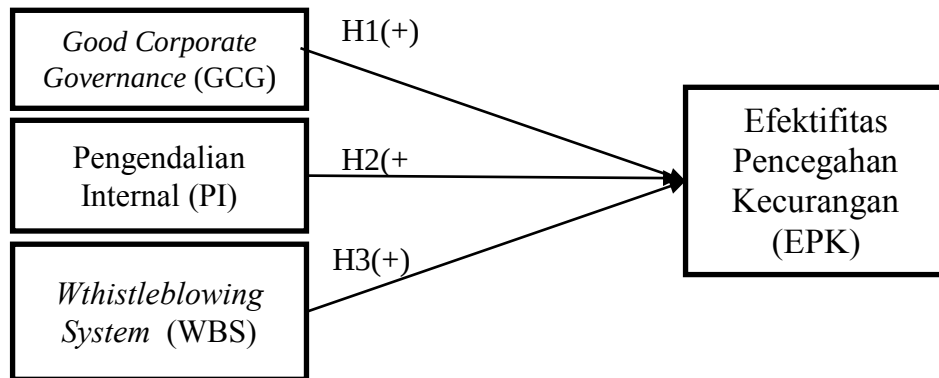
Sistem ini bertujuan untuk mengungkap kecurangan yang dapat merugikan organisasi dan mencegah kecurangan yang lebih banyak lagi. (Widyawati *et al.*, 2019). Sudarma *et al.*, (2019) menjelaskan kehadiran *whistleblowing system* membawa perubahan yang sangat berarti bagi perusahaan karena keuntungannya yaitu karyawan secara tidak langsung dapat saling mengawasi satu sama lain. Perusahaan cenderung menuju prinsip keterbukaan dan memberikan penghargaan kepada setiap karyawan yang berani serta memiliki inisiatif dengan melaporkan adanya pelanggaran yang terjadi di dalam perusahaan, juga memberikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap karyawan.

Perbedaan kepentingan *agent* dan *principal* membuat masing-masing pihak berupaya memperbesar keuntungannya untuk diri mereka sendiri. Mekanisme kontrol untuk mengurangi masalah agensi dapat dilakukan melalui upaya *monitoring* dan *bonding*. Mekanisme *monitoring* dapat dilakukan dengan adanya *whistleblowing system*. Hal ini karena tidak semua orang merasa acuh atas apa yang mereka ketahui. Untuk mendapatkan informasi yang berindikasi pelanggaran, maka diperlukan suatu sistem pelaporan untuk meminimalkan masalah agensi tersebut. Oleh karena itu penerepan *whistleblowing system* di suatu perusahaan sangat penting untuk mencegah terjadinya kecurangan, karena setiap

pegawai merasa diawasi oleh pegawai yang lainnya sehingga enggan untuk melakukan kecurangan (Wardana *et al.*, 2017).

Clinton & Lay (2019) menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Wahyuni & Nova (2019) menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Lestari (2019) menyatakan efektivitas *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini berarti bahwa semakin baik penerapan efektivitas *whistleblowing system*, maka dalam pencegahan kecurangan akan meningkat. Widiyarta *et al.*, (2017) menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Penerapan *whistleblowing system* yang efektif, transparan dan bertanggung jawab akan mendorong partisipasi masyarakat dan pegawai untuk lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya.

H3. Whistleblowing System berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan.

D. Model Penelitian

Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung terdapat 18 Bank Perkreditan Rakyat yang bertempat di Kabupaten Temanggung.

b. Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Pegawai di Bank Perkreditan Rakyat yang terdiri dari Direktur, PE Kepatuhan & Manajemen Resiko, Kepala Cabang, Kepala Kas, Kepala Operasional, Kepala Bagian Kredit, Kepala Bagian Dana, Kepala Bagian Pembukuan & Admin Legal, Kepala Satuan Kerja Audit Intern, Kepala Sieksi Pelayanan dan Kepala Sieksi Pemasaran.
- 2) Pegawai di Bank Perkreditan Rakyat yang telah bekerja minimal 1 tahun karena dianggap memiliki pengalaman, sehingga karyawan dapat memberikan jawaban sesuai dengan profesionalismenya dalam efektivitas pencegahan kecurangan

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau dari tempat aktual terjadinya peristiwa. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan daftar Bank Perkreditan Rakyat dan alamat diperoleh dari (www.ojk.go.id). Sumber data dalam penelitian ini adalah jawaban yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang dibagikan kepada Karyawan di Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angket yang berisi kuesioner. Responden akan mengisinya sesuai dengan pendapat dan pemikiran dari responden. Kuesioner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis data. Teknik ini menjadikan responden yang menjadi subjek penelitian harus bertanggungjawab untuk memilih dan menjawab pertanyaan maupun pernyataan.

Cara ini dipilih oleh peneliti dengan metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli melalui kuesioner lebih efektif dan efisien untuk dilakukan pada subjek yang jumlahnya banyak. Selain itu dengan data primer peneliti dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan, karena data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian dapat dieliminir atau setidaknya dapat dikurangi.

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1	Efektivitas Pencegahan Kecurangan (Y)	Efektivitas Pencegah kecurangan merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi terjadinya kecurangan (Karyono, 2017)	Mengacu pada penelitian yang dikembangkan oleh Festi <i>et al.</i> , (2014) dengan indicator : 1. Penetapan kebijakan <i>anti fraud</i> 2. Prosedur pencegahan baku 3. Organisasi 4. Teknik Pengendalian 5. Kepekaan dalam <i>fraud</i>	Diukur dengan menggunakan skala interval 5 poin, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju sampai skala 5 = Sangat Setuju 11 butir pernyataan
2	<i>Good Corporate Governance</i> (X1)	Antara Pemegang saham, pengurus, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan <i>intern</i> dan <i>ekstern</i> sehubungan dengan hak dan kewajiban, atau dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Sari <i>et al.</i> , 2015)	Mengacu pada penelitian Syakhroza (2003) dengan indikator : 1. <i>Transparency</i> 2. <i>Accountability</i> 3. <i>Responbility</i> 4. <i>Independency</i> 5. <i>Fairness</i>	Diukur dengan menggunakan skala interval 5 poin, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju sampai skala 5 = Sangat Setuju 16 butir pernyataan
3	Pengendalian Internal (X2)	Proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personel lainnya dalam suatu entitas yang di desain untuk menyediakan jaminan yang mengarahkan	Mengacu pada Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of Treadway Commission (2013), dengan indicator : 1. <i>Control environmen</i>	Diukur dengan skala interval 5 poin, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju sampai skala 5 = Sangat Setuju

Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran Variabel (Lanjutan)

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
4	<i>Whistleblowing System</i> (X3)	pencapaian tujuan berhubungan dengan operasional pelaporan dan kepatuhan (Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of Treadway Commission, 2013) <i>Whistleblowing system</i> adalah suatu sistem pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan (Semendawai, 2011).	Mengacu pada Semendawai, (2011), dengan 3 indikator : 1. Aspek Struktural 2. Aspek Operasional 3. Aspek Perawatan	20 butir pernyataan Diukur dengan skala interval 5 poin, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju sampai skala 5 = Sangat Setuju 11 butir pernyataan

sumber : data penelitian terdahulu, 2020

D. Alat Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu metode-metode pengumpulan, penyajian, dan pengaturan data yang berguna untuk membuat gambaran yang jelas variasi sifat data yang dapat mempermudah proses analisis dan interpretasi. Menurut (Ghozali, 2018), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, *minimum*, *maksimum*, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur *valid* dan tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner akan dikatakan *valid* jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan dan menjelaskan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik korelasi ini digunakan untuk menguji validitas berbagai pernyataan dalam penelitian ini adalah *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*. Tujuannya untuk menguji apakah pengelompokan indikator berdasarkan variabel latennya konsisten berada dalam konstruksinya atau tidak. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018;51).

Beberapa alat uji yang digunakan dalam mengukur tingkat interkorelasi antar variabel adalah *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA)*. Nilai KMO sendiri bervariasi mulai dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ untuk dapat dilakukan analisis faktor dan *cross loading* $> 0,50$ untuk menentukan kevalidan dari setiap item pernyataan (Ghozali, 2018;57).

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dapat dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran yang dilakukan apakah tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Pengujian

reliabilitas masing-masing instrumen peneliti akan menggunakan koefisien *cronbach alpha* (α). Jika koefisien *cronbach alpha* (α) > 0,70 maka pertanyaan dinyatakan andal. Sebaliknya, jika koefisien *cronbach alpha* (α) < 0,70 maka pertanyaan dinyatakan tidak andal (Ghozali, 2018:45-46).

E. Pengujian Hipotesis

1. Uji Regresi Linear Berganda

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda (*multiple regression analysis*) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:161). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance*, pengendalian internal, *whistleblowing system* terhadap efektivitas pencegahan *fraud* (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Temanggung. Adapun model persamaan *regresi linear* berganda adalah sebagai berikut:

$$EPK = a + \beta_1 GCG + \beta_2 PI + \beta_3 WBS + e$$

Keterangan :

GCG = *Good Corporate Governance*

PI = *Pengendalian Internal*

WSB = *Whistleblowing System*

EPK = *Efektivitas Pencegahan Kecurangan*

β = koefisien regresi

a = konstanta

e = *Error*

2. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

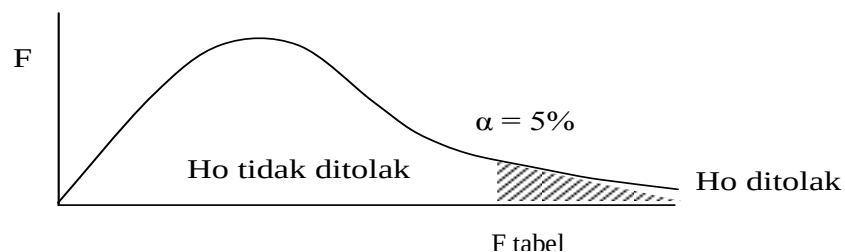
Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2018). Uji R^2 menunjukkan potensi pengaruh semua variabel independen yaitu *Good Corporate Governance*, *Pengendalian Internal* dan *Whistleblowing System* terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu, semakin mendekati 0 maka koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas (Ghozali, 2018).

b. Uji f (*Goodness of fit*)

Uji statistik f pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*Goodness of fit*). Uji f menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fit atau tidak (Ghozali, 2018;98). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji f adalah berupa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut $(df) = n - k - 1$ dimana k adalah jumlah variabel bebas, pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

- 1) Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$, atau $p\text{ value} < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima artinya model yang digunakan dalam penelitian bagus (*fit*).
- 2) Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$, atau $p\text{ value} > \alpha = 0,05$ maka H_0 tidak ditolak atau H_a tidak diterima, maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (*tidak fit*).

Perbandingan nilai kritis yang diperoleh ini selanjutnya akan dikonfersikan dengan nilai tabel sesuai dengan ketentuan dalam.

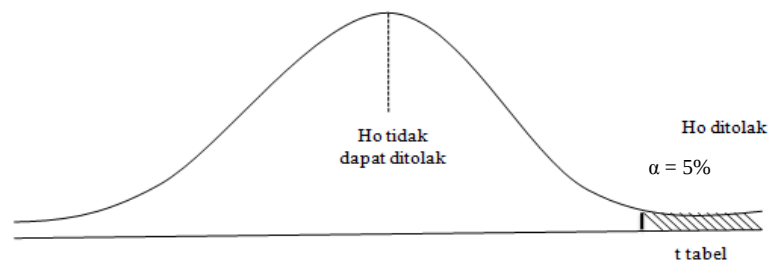


Gambar 3.1
Penerimaan Uji f

c. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n-1$ (Ghozali, 2018;99).

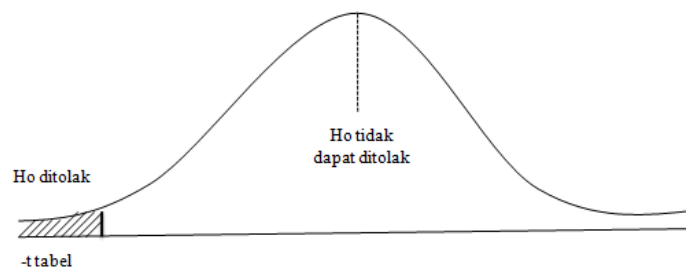
- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $p\text{ value} < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $p\text{ value} > \alpha = 0,05$ maka H_0 tidak ditolak dan H_a tidak diterima berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Penerimaan Uji t positif

Dasar kriteria penerimaan hipotesis negatif:

- a) Jika $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau $P\text{ value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti variabel independen mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel dependen.
- b) Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $P\text{ value} > \alpha = 0,05$, maka H_0 tidak ditolak dan H_a tidak diterima, berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel dependen.



Gambar 3.3
Penerimaan Uji t negatif

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *good corporate governance*, pengendalian internal dan *whistleblowing system* terhadap efektivitas pencegahan kecurangan. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap efektivitas pencegahan kecurangan. *Good Corporate Governance* di Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini diartikan adanya *good corporate governance* dalam sebuah perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan dapat mengurangi resiko terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, penerapan *good corporate governance* menjadi factor penting dalam pencegahan kecurangan.

Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap efektivitas pencegahan kecurangan. Hal ini diartikan pengendalian internal yang dievaluasi dengan baik akan dapat mencegah terjadinya kecurangan, pengendalian internal yang lemah dapat memberi celah pelaku untuk melakukan tindakan kecurangan. *Whistleblowing System* berpengaruh positif terhadap efektivitas pencegahan kecurangan. Hal ini diartikan *whistleblowing system* sudah diterapkan dengan baik dan semaksimal mungkin untuk dapat mencegah terjadinya kecurangan di Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung. Adanya, *whistleblowing system* yang proaktif akan mendorong

partisipasi karyawan perusahaan untuk berani melaporkan terjadinya kecurangan dalam perusahaan.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu sampel yang digunakan baru 18 Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung dengan tingkat kecurangan tertinggi Se-Karesidenan Kedu, sehingga penelitian ini belum dapat digeneralisasi di Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung.
2. Penelitian ini hanya terdapat 56% pernyataan yang tidak valid karena penelitian ini tidak melakukan uji validitas terhadap kuesioner, sebelum kuesioner ini disebar.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya seluruh Bank Perkreditan Rakyat Se-Karesidenan Kedu serta perlu dilakukan penelitian ulang dengan aspek yang sama untuk mengetahui konsistensi hasil dari penelitian sebelumnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel yang diduga dapat berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan kecurangan, misalnya seperti budaya organisasi, kualitas sistem informasi akuntansi, dan audit internal.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2016). Report To the Nations on Occupational Fraud and Abuse: 2016 Global Fraud Study. *Association of Certified Fraud Examiners*.
- Adiko, R. G., Astuty, W., & Hafisah. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Etika Auditor, dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud PT. Inalum. 2(1), 52–68.
- Agoes, S. (2017). Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik..
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). Fraud Examination. *South-Western Cengage Learning*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Auditing Standards Board. SAS No.78 (AU 319). (1995). *Consideration of Internal Control in A Financial Statement Audit (An Amandme)*. American Institute of Certified Public Accountants, Inc.
- Azis, H. A. (2015). *Fraud dan Korupsi (Pencegahan, Pendeteksian, dan Pemberantasannya)* (Cetakan Pe, p. 9). PT. Lestari Kiranatama.
- BPKP. (2015). Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)*.
- Clinton, A., & Lay, I. (2019). Efektivitaswhistleblowing Systemdalam Mencegahfraud.
- Committee of Sponsoring Organization (COSO). (2013). Internal Control , Integrated Framework. *Executive Summary (Durham)*.
- Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of Treadway Commission. (2013). Internal Control Integrated Framework. *Jersey City*.
- Coso, T. C. of S. O. of the T. C. (2013). Internal control - integrated framework: executive summary. *New York*. <https://doi.org/978-1-93735-239-4>
- Dewi, K.Y., Ratnadi, N. M. (2017). Pengaruh pengendalian internal, integritas dan asimetri informasi pada kecenderungan kecurangan akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.12, No.*
- Dinata, R. O., Irianto, G., & Mulawarman, A. D. (2018). Menyingkap Budaya Penyebab Fraud: Studi Etnografi Di Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Economia*. <https://doi.org/10.21831/economia.v14i1.18453>
- Festi, T., Andreas, & Natariasari, R. (2014). Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada Perbankan Di Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.

- Firnanda, R., Fariz, M., Pangestu, L. P., Umar, H., & Trisakti, U. (2019). *Pengaruh budaya organisasi dan kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan dengan pengendalian internal sebagai variabel moderasi*. 2013, 1–7.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). (2001). *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*. (Edisi ke-3).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herbert. (1979). Auditing the Performance Management. In *Wadsworth, Inc.*
- Husna, F. (2013). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas Dan Implementasi Good Corporate Governanceterhadap Kecurangan. *Artikel Ilmiah*.
- Jensen, & Mecking. (1976). The Teory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economic*, 3, 305–360.
- Karyono. (2017). Forensic Fraud. Yogyakarta: CV. Andi. In cv. Andi. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Kathleen M. Eisenhardt. (1989). Agency Theory: An Assessment and ReviewKathleen M. Eisenhardt. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy Ol Managwneni Review*, 14(1), 57–74. <https://doi.org/10.1159/000169659>. *Academy Ol Managwneni Review*. <https://doi.org/10.1159/000169659>
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). *Pedoman Sistem Pelaporan atau Whistleblowing System*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Kurniawan, P. C., & Izzaty, K. N. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 55–60. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.2>
- La Porta, R., Lopez-De-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Investor protection and corporate governance. *Journal of Financial Economics*. <https://doi.org/10.2469/dig.v31.n2.870>
- Larasati, Y. S., & Surtikanti, S. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud di Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa (Riset Empiris pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KEMENTERIAN KELAUTAN dan PERIKANAN). *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*. <https://doi.org/10.28932/jafta.v1i1.1526>
- Lestari, I. P. (2019). Penerapan Akuntansi Forensik, Auditor Investigatif, Efektivitas Whistle Blowing System dan Pencegahan Fraud pada Kantor

- Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. 558–563.
- Lestari, I. P., Widaryanti, & Sukanto, E. (2019). Penerapan Akuntansi Forensik, Auditor Investigatif, Efektivitas Whistle Blowing System dan Pencegahan Fraud pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. 558–563.
- Libramawan, I. (2014). Pengaruh Penerapan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Survey pada PT Coca-Cola Amatil Indonesia SO Bandung). *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama*.
- Megawati, M. H. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Budaya Etis Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Fraud Pada Universitas Swasta Di Bandar Lampung. *Journal of Chemical Information and Modeling*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Miceli, M. P., & Near, J. P. (1985). *Characteristics of Organizational Climate and Perceived Wrongdoing Associated with Whistle-Blowing Decisions*. *Personnel Psychology*, 38, vol 4:1.
- Nadia, Fahd Akhmad, Sukarmanto, & P. (2018). *Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan*. Vol.4, No.
- Nugroho, Vredy Octaviari. (2015). Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Perilaku Etis Sebagai Variabel Intervening Pada Pt Pagilaran.
- Nur Cahyo, M., & Sulhani, S. (2017). Analisis Empiris Pengaruh Efektifitas Komite Audit, Efektifitas Internal Audit, Whistleblowing System, Pengungkapan Kecurangan dan Reaksi Pasar. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.24815/jdab.v4i2.7704>
- R. Setiawan. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas, Implementasi Good Corporate Governance Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Fraud Pada Perusahaan BUMN Di Kota Pekanbaru. *JOM Fekon*, 3(1), 1–15.
- Rohimah, I., & Anna, D. Y. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan ISSN 2088-5008*, 13 nomor 1(1), 67–76.
- Rowa, C. W. F., & Arthana, I. K. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, Vol.7, No., hal. 122-137.
- Salim, S., Wijaya, H., Cahyadi, H., & Angela, J. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi, Peran Auditor Internal, Peran Auditor Eksternal, dan Internal Control Terhadap Pencegahan Fraud di Surabaya. *Conference on Management and Behavioral Studies*, 135–145.
- Sari, M. S., & Saputri, D. A. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal Persediaan

- Dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Persediaan Pada PT . Indofarma Global Medica Bandar Lampung. *Seminar Nasional Darmajaya*, 1, 10–18.
- Sari, N. L. P. P., Yuniarta, G. A., & Adiputra, I. M. P. (2015). Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Persepsi Kesesuaian Kompensasi dan Implementasi Good Governance terhadap Kecenderungan Fraud (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Tabanan). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Sawyer, LB., et al. (2003). 5th edition. The Institute of Internal Auditors. USA. In *Internal auditing* (5th editio). The Institute of Internal Auditors.
- Semendawai, dkk. (2011). *Memahami Whistleblower*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Silvia, N., & Pakpahan, C. (2019). Pengaruh Audit Internal Dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus : Inspektorat Provinsi Jawa Barat) The Effect Of Internal Audit And Internal Control Of Prevention (*Case Study at the Inspe*. 6(3), 5687–5697.
- Soleman, R. (2013). Pengaruh pengendalian internal dan good corporate governance terhadap pen cegahan fraud. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(1), 57–74. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss1.art5>
- Sudarma, K. A., Purnamawati, I. G. A., & Herawati, N. T. (2019). Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Budaya Kejujuran dan Whistleblowing System dalam Pencegahan Fraud pada Pt . BPR Nusamba Kubutambahan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(3), 435–446.
- Sudarmo, Sawardi, & Yulianto, A. (2008). *Fraud Auditing* (Edisi Keli). Pusdiklat BPKP.
- Sumendap, P., hidayat Hidayat, W., Prabowo, A., Hartono, H., Sartika, S., Sari, R. K., ... & Umar, H. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*.
- Susanto, A. (2017). Pengertian Sistem Informasi Akuntansi. *Sistem Informasi Akuntansi*.
- Susmanschi, G. (2012). *Internal Audit and Whistle-Blowing. Economics, Management, and Financial Markets*. Vol. 7 (4), 415– 421.
- Sutedi andrian. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syakhroza Akhmad. (2003). Best Practices Corporate Governance Dalam Konteks Kondisi Lokal Pebankan Indonesia. *Jurnal Usahawan*, 06 (XXXII), 14–15.
- Tuanakotta, T. M. (2010). Akuntansi Forensik & Audit Investigatif. In *Edisi 2*. <https://doi.org/10.1016/j.clay.2015.06.031>

- Tulus, A. M. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Umar, H. (2017). *Corruption The Devil*. Penerbit Universitas Trisakti.
- Utami, L., Handajani, L., & Hermanto. (2019a). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Efektivitas Komite Audit dan Audit Internal terhadap Kasus Kecurangan dengan Whistleblowing System sebagai Variabel Pemoderasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram) , NTB , Indonesia *PENDAHULUAN K.* 26, 1570–1600.
- Utami, L., Handajani, L., & Hermanto, H. (2019b). Efektivitas Komite Audit dan Audit Internal terhadap Kasus Kecurangan dengan Whistleblowing System sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p27>
- Wahyuni, E. S., & Nova, T. (2019). Analisis Whistleblowing System Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 6(2), 189. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v6i2.867>
- Wardana, I. G. A. K., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Widyawati, N. P. A., Sujana, E., & Yuniarta, G. A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistle Blowing System, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Bumdes. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 10(3), 368–379.
- Wulandari, D. N., & Nuryanto, M. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Kesadaran Anti-Fraud, Integritas, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i2.557>
- www.bi.go.id .
- www.bi.go.id. *Whistle Blowing System*. <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/governance/commitment/wbs/Contents/Default.aspx>
- www.bisnis.com. (2019). Kebanyakan Bank di Indonesia Gugur karena Faktor Kecurangan. [Www.Bisnis.Com](https://finansial.bisnis.com/read/20190727/90/1129515/kebanyakan-bank-di-indonesia-gugur-karena-faktor-kecurangan). <https://finansial.bisnis.com/read/20190727/90/1129515/kebanyakan-bank-di-indonesia-gugur-karena-faktor-kecurangan>

www.kemenkeu.go.id.

www.lps.go.id. (n.d.).

www.ojk.go.id. <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>

www.pd-bprbkktemanggung.com. <http://www.pd-bprbkktemanggung.com/detail.php?id=11>

www.semarang.bpk.go.id.